

	News Title : Bursa Kripto Dibentuk 2023	
	Media Name : Investor Daily	Journalist : Leonard AL Cahyoputra
	Publish Date : 05 January 2023	Tonality : Positive
	News Page : 9	News Value : 345,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 115,000,000
	Section/Rubrication : Industries Trade and Services	Topic : Bursa Aset Kripto

Bursa Kripto Dibentuk 2023

JAKARTA, ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menargetkan bursa kripto diluncurkan tahun ini, sebelum kewenangan pengawasan dan pengelolaan aset kripto diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 24 bulan. Bappebti diberi waktu enam bulan menyusun draf peraturan pemerintah (PP) mengenai masa transisi selama dua tahun untuk perpindahan kewenangan dari Bappebti ke OJK.

Oleh Leonard AL Cahyoputra

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kewenangan pengawasan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif mata uang akan beralih ke OJK. “Masa transisi itu akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan,” katanya dalam konferensi pers secara hybrid, Rabu (4/1/2023).

Pembentukan bursa kripto telah mengalami kemunduran tiga kali dari target. Semula ditargetkan dibentuk pada akhir 2021, kemudian mundur kuartal I-2022, dan berikutnya dijadwalkan akhir 2022.

Didid menjelaskan, sepanjang tahun lalu pihaknya telah membangun tata kelola sistem pengaturan aset kripto. Ini dimulai dari sistem bursa, kustodian, lembaga kliring, pedagang aset fisik, serta pelanggan. Namun realisasi pembentukan bursa kripto tidak kunjung terjadi.

Mengingat pentingnya keberadaan kelembagaan kripto, Bappebti bakal mengupayakan pembentukan bursa kripto beserta kustodian dan kliring bisa rampung tahun 2023. “Kami upayakan bursa ini bisa secepatnya selesai, karena kalau tidak, Bappebti akan menanggung risiko yang tidak bagus buat kami,” kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kendala utama adalah kesulitan mencari pembanding bursa kripto yang baik. Pemerintah ingin agar kelembagaan aset kripto di Indonesia berjalan baik dan tidak menghadapi masalah ketika kripto berkembang pesat.

“Kami kesulitan mencari yang kira-kira sesuai dengan Indonesia. Ini membuat keterlambatan,” kata Didid.

Merugikan Bappebti

Didid menjelaskan lebih lanjut, keterlambatan peluncuran bursa kripto turut merugikan Bappebti, karena tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko yang berkaitan dengan transaksi aset

Nilai Transaksi Aset Kripto Rp Triliun, Tahun 2021-November 2022



Sumber : Laporan Calon Pedagang Aset Kripto, diolah Bappebti.

kripto di dalam negeri. Karena itu, apabila timbul permasalahan dalam transaksi aset kripto yang menimpa pedagang maupun pembeli, tanggung jawab berada di tangan Bappebti.

“Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun, Bappebti harus mengambil risiko itu,” ujar dia.

Untuk itu, Didid kembali memastikan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi dan rampung tahun ini. “Karena kalau enggak, Bappebti menanggung risiko sendiri,” ucap dia.

Mengenai pemindahan kewenangan untuk pengawasan dan pengelolaan aset kripto dan derivatif dari Bappebti ke OJK, Didid menerangkan, hal itu bukan karena Bappebti gagal mengelolanya. Mengacu UU P2SK tersebut, lanjut dia, Bappebti sudah mulai berdiskusi dengan BKF mengenai apa saja muatan peraturan pemerintah tersebut, dan menentukan regulasi mana yang bisa dipertahankan, disempurnakan, dan yang harus dibuat lagi.

Selama peralihan ini belum berjalan, proses pembinaan, perizinan, dan pengawasan terkait aset kripto dan derivatif masih akan dikelola oleh Bap-

pebti. “Jadi, perpindahan kewenangan itu bukan karena kami gagal mengelola, karena baik aktivitas kripto maupun derivatif yang terkait dengan sekuritas dan mata uang justru tumbuh sejak 2018. Permasalahan memang ada, namun relatif dapat diatasi,” ujar dia.

Didid menuturkan, aset kripto dan perdagangan derivatif berpindah, antara lain, dikarenakan laporan Financial Stability Board (FSB) pada tahun 2022 menyebut pertumbuhan nilai aset kripto yang pesat dapat berdampak pada nilai keuangan. Sehingga, saat itu, disepakati untuk menghasilkan kebijakan publik yang harus *forward looking*, tidak hanya melihat sisi historis.

“Mengacu prediksi yang berpotensi menimbulkan dampak pada stabilisasi keuangan dan kompleksitas, maka antisipasi pun dilakukan dengan pemindahan dua poin tersebut ke OJK. Jadi, pemerintah maupun DPR *forward looking*, jangan sampai ada masalah baru kita ribut,” imbuh Didid.

Dia mengakui pasar aset kripto tengah mengalami musim dingin atau masa sulit. Diperkirakan masa sulit aset kripto masih berlangsung sepanjang tahun ini.

“Kripto adalah 3 besar (pilihan) orang untuk investasi, tapi popularitasnya menurun. Artinya, ada potensi,

tapi masih berat,” ujar Didid.

Di Amerika Serikat (AS), minat investor terhadap aset kripto cenderung menurun. Kendati demikian, dia meyakini aktivitas ekonomi, termasuk investasi digital, masih berpeluang tumbuh. Salah satunya, berkat aset kripto.

“Perdagangan aset kripto bisa menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat dan mendorong ekonomi digital hingga di 2030. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengelolaan perdagangan aset itu. Itu sebabnya menjadi concern Bappebti di 2023 untuk memastikan agar ekonomi digital bisa berjalan menjadi lebih baik,” ujar Didid.

Dia mengungkapkan, nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari hingga November 2022 sebesar Rp 296,66 triliun. Ini turun drastis dibanding pada 2021 yang sebesar Rp 859,4 triliun. Di sisi lain, total pelanggan terdaftar aset kripto meningkat, dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 16,55 juta pada 2022.

Didid juga menyampaikan, pihaknya tengah melakukan *review* terhadap 151 koin baru aset kripto. “Sejauh ini tercatat 383 koin kripto telah resmi terdaftar. Kami sedang melakukan *analytical hierarchy process* (AHP) terhadap 151 jenis koin, di mana di dalamnya itu ada 10 jenis koin lokal juga,” ujar dia. (en)